

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR … TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

|  |  | Draf RPOJK | Penjelasan | Tanggapan  (Diisi narasi tanggapan) | Usulan Perubahan  (Diisi *drafting* perubahan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menim-bang | : | bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 132 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. | 1. UMUM   Penerbitan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sektor keuangan Indonesia.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum bagi LJK untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bulion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.  Emas kerap digunakan sebagai perhiasan, uang koin, aset investasi, serta bahan campuran dalam pembuatan mesin pesawat, peralatan komunikasi, dan lain - lain. Dengan pemanfaatannya yang tinggi tersebut tidak heran jika emas dikomersialisasikan oleh berbagai pihak.  Indonesia sebagai salah satu negara dengan penghasil emas dan kepemilikan cadangan emas yang cukup tinggi di dunia belum mampu mengoptimalkan limpahan emas yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya, wujud nyata upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan limpahan emas di Indonesia tersebut dilakukan dengan mengatur kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.  Dalam rangka memberikan pedoman bagi LJK dalam menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion, perlu diatur beberapa ketentuan antara lain mengenai cakupan Kegiatan Usaha Bulion, persyaratan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, mekanisme persetujuan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion, penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Manajemen Risiko bagi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, penerapan prinsip kehati-hatian, dan pengenaan sanksi administratif.  Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Meng-ingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan |  |  |  |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845). |  |  |  |
|  |  | MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Mene-tapkan | : | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BULION | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas |  |  |
|  |  | 1. Kegiatan Usaha Bulionadalahkegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Simpanan Emas adalah sejumlah emas yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak. |  |  |  |
|  |  | 1. Pembiayaan Emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. |  |  |  |
|  |  | 1. Perdagangan Emas adalah kegiatan transaksi jual beli maupun kegiatan tukar menukar emas yang terstandarisasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak. |  |  |  |
|  |  | 1. Penitipan Emas adalah kegiatan dalam bentuk penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak serta tidak diperuntukan untuk dikelola melalui aktivitas Pembiayaan Emas. |  |  |  |
|  |  | 1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. |  |  |  |
|  |  | 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KEGIATAN USAHA |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |  |
|  |  | Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kegiatan Usaha Bulion meliputi: |  |  |  |
|  |  | 1. pengelolaan Simpanan Emas; | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. penyaluran Pembiayaan Emas; | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Perdagangan Emas; | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Penitipan Emas; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain yaitu dapat berupa penyelenggaraan aktivitas derivatif serta kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  | 1. Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  | 1. Kegiatan Usaha Bulion yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan: |  |  |  |
|  |  | 1. prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah); | Yang dimaksud dengan “keadilan (‘adl)” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.  Yang dimaksud dengan “keseimbangan (tawazun)” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.  Yang dimaksud dengan “kemaslahatan (maslahah)” merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.  Yang dimaksud dengan “universalisme (alamiyah)” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). |  |  |
|  |  | 1. tidak mengandung hal yang diharamkan, seperti riba, maisir, gharar, zalim, risywah, maksiat, dan objek haram; dan | Yang dimaksud dengan “riba” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah).  Yang dimaksud dengan “maisir” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.  Yang dimaksud dengan “gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.  Yang dimaksud dengan “zalim” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan "risywah" adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.  Yang dimaksud dengan “maksiat” adalah tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. |  |  |
|  |  | 1. dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menggunakan standar emas yang berlaku di Indonesia dan/atau yang setara berdasarkan standar praktik internasional yang berlaku.​ | Contoh standar emas yang berlaku di Indonesia antara lain standar yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang (Persero), sedangkan untuk standar emas yang berlaku sesuai praktik internasional antara lain yang dikeluarkan oleh London Bullion Market Asociation. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi standar minimum keamanan infrastruktur, sarana, dan prasarana dalam rangka menjaga keamanan emas yang dikelola dan ditransaksikan. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum infrastruktur, sarana, dan prasarana dalam rangka menjaga keamanan emas yang dikelola dan ditransaksikan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |  |
|  |  | Pengelolaan Simpanan Emas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan pemberian bunga/bagi hasil berbentuk gramasi emas kepada nasabah yang melakukan kegiatan Simpanan Emas. | Yang dimaksud ‘gramasi emas’ adalah satuan yang menyatakan berat emas dalam gram. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam rangka kegiatan pengelolaan Simpanan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan emas yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan Pembiayaan Emas. | Pengelolaan Simpanan Emas yang berasal dari nasabah penyimpan untuk dapat disalurkan sebagai Pembiayaan Emas dikenal dengan istilah *unallocated account*. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Simpanan emas dicatat sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion (*on-balance sheet*). |  |  |  |
|  |  | Bagian Ketiga |  |  |  |
|  |  | Penyaluran Pembiayaan Emas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam rangka kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam rangka kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menggunakan emas yang disimpan oleh nasabah Simpanan Emas. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat membebankan agunan kepada nasabah yang akan memperoleh fasilitas Pembiayaan Emas. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK wajib memastikan pengembalian dari nasabah yang memperoleh fasilitas Pembiayaan Emas berupa emas*.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pembiayaan Emas dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion (*on-balance sheet)*. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Bagian Keempat |  |  |  |
|  |  | Perdagangan Emas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi emas yang akan ditransaksikan pada kegiatan perdagangan emas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Untuk pertama kali, batas minimum gramasi emas yang akan ditransaksikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit sebesar 500 (lima ratus) gram per transaksi. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Batas minimum gramasi emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditinjau dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Kelima |  |  |  |
|  |  | Penitipan Emas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara kegiatan Usaha Bulion wajib bertanggung jawab untuk menyimpan emas yang dititipkan oleh nasabah dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan perjanjian dalam rangka kegiatan Penitipan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib membukukan dan mencatat secara tersendiri atas emas yang dititipkan oleh nasabah dari laporan posisi keuangan penyelenggara (*off-balance sheet*). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion mengalami kepailitan, emas yang dititipkan oleh nasabah tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mengembalikan kepada nasabah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi jangka waktu penitipan emas sesuai dengan perjanjian yang disepakati. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilarang menggunakan emas yang dititipkan oleh nasabah sebagai emas yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau Perdagangan Emas. | Pengelolaan emas milik nasabah dalam rangka penitipan emas dikenal pula dengan istilah *allocated account*. |  |  |
|  |  | Bagian Keenam |  |  |  |
|  |  | Kegiatan Lain |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Untuk dapat melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. rencana untuk melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion dimaksud telah dicantumkan dalam rencana bisnis; dan |  |  |  |
|  |  | 1. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. skema atau mekanisme kegiatan lain yang akan dilakukan; |  |  |  |
|  |  | 1. penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko; |  |  |  |
|  |  | 1. analisis prospek usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. hak dan kewajiban para pihak; dan |  |  |  |
|  |  | 1. contoh perjanjian yang akan digunakan. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); |  |  |  |
|  |  | 1. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maupun pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang sektor jasa keuangan; dan |  |  |  |
|  |  | 1. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan lain yang diajukan. |  |  |  |
|  |  | 1. Direksi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan melakukan kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Ketujuh |  |  |  |
|  |  | Penegakan Kepatuhan |  |  |  |
|  |  | Paragraf 1 |  |  |  |
|  |  | Rencana Pemenuhan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  | 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  | 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana pada ayat (2). |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion tetapi rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu tertentu. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat melaksanakan rencana pemenuhan. |  |  |  |
|  |  | 1. Jangka waktu rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rencana pemenuhan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Paragraf 2 |  |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang: |  |  |  |
|  |  | 1. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (7), dan/atau ayat (13): |  |  |  |
|  |  | 1. ditolak rencana pemenuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9); |  |  |  |
|  |  | 1. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 19, dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. peringatan tertulis/teguran tertulis; |  |  |  |
|  |  | 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha/pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk menerbitkan produk baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan kegiatan usaha baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pemberhentian pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. denda/denda administratif. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PERSYARATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |  |
|  |  | Kriteria Lembaga Jasa Keuangan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion hanya dapat dilakukan oleh LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Contoh LJK dengan kegiatan usaha utama berupa penyaluran kredit atau pembiayan antara lain bank umum, lembaga pembiayaan, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. |  |  |
|  |  | 1. Untuk dapat mengajukan persetujuan sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 atau yang setara dengan peringkat komposit 2, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi LJK yang mengajukan permohonan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |  |
|  |  | Bentuk Badan Hukum |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Bagian Ketiga |  |  |  |
|  |  | Kepemilikan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat didirikan oleh: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. warga negara Indonesia; |  |  |  |
|  |  | 1. warga negara asing; |  |  |  |
|  |  | 1. badan hukum Indonesia; |  |  |  |
|  |  | 1. badan hukum asing; |  |  |  |
|  |  | 1. pemerintah pusat; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. pemerintah daerah. |  |  |  |
|  |  | 1. Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion hanya melalui transaksi di bursa efek. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Bagian Keempat |  |  |  |
|  |  | Ekuitas pada Saat Permohonan Izin |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus memiliki modal inti atau ekuitas pada saat permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). | Yang dimaksud ‘modal inti’ adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di sektor perbankan.  Yang dimaksud dengan ‘ekuitas’ adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. |  |  |
|  |  | Bagian Kelima |  |  |  |
|  |  | Persyaratan Kelembagaan dan Kepengurusan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memiliki: |  |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) orang direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion; |  |  |  |
|  |  | 1. satuan kerja khusus yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion; |  |  |  |
|  |  | 1. sarana dan prasarana yang memadai antara lain tempat penyimpanan serta sistem dan teknologi informasi dalam rangka menunjang Kegiatan Usaha Bulion; dan |  |  |  |
|  |  | 1. sumber daya manusia yang bersertifikasi antara lain di bidang penaksir, manajemen risiko, pengelolaan investasi, dan teknologi informasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat dirangkap oleh anggota Direksi lainnya dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan . |  |  |  |
|  |  | 1. Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kompetensi dan komitmen dalam penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari calon anggota Direksi yang baru atau anggota Direksi yang telah menjabat pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Bagi direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari calon anggota Direksi yang baru harus memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penunjukan anggota Direksi yang telah menjabat pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagai direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penunjukan efektif. |  |  |  |
|  |  | 1. Bagi direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari anggota Direksi yang telah menjabat pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses wawancara oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang memiliki kompetensi dan komitmen dalam penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, LJK penyelenggara Kegiatan Ussaha Bulion wajib melakukan peninjauan kembali atas penunjukan tersebut. | Yang dimaksud dengan “peninjauan kembali” adalah melakukan:   1. peningkatan pengetahuan dan pemahaman direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha jika yang bersangkutan dinilai kurang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion; atau 2. penggantian direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion jika yang bersangkutan dinilai kurang memiliki komitmen dalam penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan satuan kerja khusus yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dipimpin oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a. |  |  |  |
|  |  | 1. Pemimpin satuan kerja khusus yang menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pihak utama dan harus memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan sumber daya manusia yang bersertifikasi memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Keenam |  |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan/atau Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. peringatan tertulis/teguran tertulis; |  |  |  |
|  |  | 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha/pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk menerbitkan produk baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan kegiatan usaha baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pemberhentian pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. denda/denda administratif. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PERSETUJUAN KEGIATAN USAHA BULION |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion hanya dapat melakukan Kegiatan Usaha Bulion setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direksi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. data pemimpin satuan kerja penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang meliputi: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku bagi yang berkewarganegaraan asing; |  |  |  |
|  |  | 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen lain yang setara bagi yang berkewarganegaraan asing; |  |  |  |
|  |  | 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru ukur 4 x 6 cm; |  |  |  |
|  |  | 1. bukti pengangkatan sebagai pemimpin satuan kerja; |  |  |  |
|  |  | 1. surat pernyataan yang menyatakan: |  |  |  |
|  |  | 1. tidak memiliki kredit macet; |  |  |  |
|  |  | 1. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan; dan |  |  |  |
|  |  | 1. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dipailitkan. |  |  |  |
|  |  | 1. fotokopi Kartu izin tinggal sementara (KITAS), Kartu izin tetap (KITAP), dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi pemimpin satuan kerja khusus berkewarganegaraan asing. |  |  |  |
|  |  | 1. rencana bisnis untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. rencana Kegiatan Usaha Bulion dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan |  |  |  |
|  |  | 1. proyeksi arus kas, posisi keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan dimulai sejak LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melakukan kegiatan operasional, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan. |  |  |  |
|  |  | 1. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia; |  |  |  |
|  |  | 1. prosedur kerja; |  |  |  |
|  |  | 1. contoh perjanjian; dan |  |  |  |
|  |  | 1. infrastuktur pendukung. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemimpin satuan kerja LJK penyelenggaara Kegiatan Usaha Bulion. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam jangka waktu tertentu. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam rangka memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; |  |  |  |
|  |  | 1. pemeriksaan ekuitas; |  |  |  |
|  |  | 1. analisis kelayakan atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b; |  |  |  |
|  |  | 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemimpin satuan kerja penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan |  |  |  |
|  |  | 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJK yang terkait. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor LJK untuk memastikan kesiapan operasional sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal permohonan persertujuan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian persetujuan Kegiatan Usaha Bulion. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal permohonan persetujuan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PENTAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA BULION |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |  |
|  |  | Umum |  |  |  |
|  |  |  | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Pentahapan pelaksanaan Kegiatan Usaha Bulion meliputi: |  |  |  |
|  |  | 1. tahap pertama; |  |  |  |
|  |  | 1. tahap kedua; dan |  |  |  |
|  |  | 1. tahap ketiga. |  |  |  |
|  |  | 1. Untuk pertama kali, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion hanya dapat menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion pada tahap pertama. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a hanya dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: |  |  |  |
|  |  | 1. pengelolaan Simpanan Emas; |  |  |  |
|  |  | 1. penyaluran Pembiayaan Emas, dengan rasio total penyaluran Pembiayaan Emas dibandingkan dengan pengelolaan Simpanan Emas (*loan to deposit ratio*) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); |  |  |  |
|  |  | 1. kegiatan Pergadangan Emas dalam bentuk fisik; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. kegiatan Penitipan Emas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b hanya dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: |  |  |  |
|  |  | 1. pengelolaan Simpanan Emas dan/atau dore; | Yang dimaksud ‘dore’ adalah emas yang mengandung campuran beberapa mineral. |  |  |
|  |  | 1. penyaluran Pembiayaan Emas, dengan rasio total penyaluran Pembiayaan Emas dibandingkan dengan pengelolaan Simpanan Emas (*loan to deposit ratio*) paling tinggi sebesar 70% (lima puluh persen); |  |  |  |
|  |  | 1. kegiatan Pergadangan Emas dalam bentuk fisik; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. kegiatan Penitipan Emas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c hanya dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: |  |  |  |
|  |  | 1. pengelolaan Simpanan Emas dan/atau dore; |  |  |  |
|  |  | 1. penyaluran Pembiayaan Emas, dengan rasio total penyaluran Pembiayaan Emas dibandingkan dengan pengelolaan Simpanan Emas (*loan to deposit ratio*) paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen); |  |  |  |
|  |  | 1. kegiatan Pergadangan Emas dalam bentuk fisik dan/atau nonfisik; | Yang dimaksud ‘Pergadangan Emas dalam bentuk nonfisik’ antara lain dalam bentuk dokumen dan/atau kertas yang disebut sebagai *paper gold.* |  |  |
|  |  | 1. kegiatan Penitipan Emas; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud ‘kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan’ antara lain transaksi luar bursa (*over the counter*), transaksi derivatif, dan transaksi sekuritisasi. |  |  |
|  |  | 1. Persyaratan dan mekanisme permohonan persetujuan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang akan melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga wajib: |  |  |  |
|  |  | 1. melakukan penilaian sendiri atas kesiapan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam melanjutkan ke tahap kedua dan/atau tahap ketiga; |  |  |  |
|  |  | 1. mencantumkan rencana untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam rencana bisnis; dan |  |  |  |
|  |  | 1. memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit meliputi: |  |  |  |
|  |  | 1. laporan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion pada tahap pertama; |  |  |  |
|  |  | 1. laporan penilaian sendiri atas kesiapan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam melanjutkan ke tahap selanjutnya; dan |  |  |  |
|  |  | 1. rencana penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion tahap selanjutnya. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen, atau menyampaikan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam memberikan persetujuan, menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen, atau menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
|  |  | 1. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); |  |  |  |
|  |  | 1. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundangan terkait lainnya di bidang sektor jasa keuangan; dan |  |  |  |
|  |  | 1. analisis kelayakan rencana penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion tahap selanjutnya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion ke tahap selanjutnya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40 dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. peringatan tertulis/teguran tertulis; |  |  |  |
|  |  | 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha/pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk menerbitkan produk baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan kegiatan usaha baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pemberhentian pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. denda/denda administratif. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LJK PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |  |
|  |  | Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Penilaian terhadap faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang Baik oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi: |  |  |  |
|  |  | 1. keterbukaan; | Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang sehat. |  |  |
|  |  | 1. akuntabilitas; | Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sehingga kinerja penyelenggara dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. |  |  |
|  |  | 1. pertanggungjawaban; | Yang dimaksud pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan Kegiatan Usaha Bulion dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang sehat. |  |  |
|  |  | 1. independensi; dan | Yang dimaksud dengan kemandirian (independency) adalah keadaan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. |  |  |
|  |  | 1. kewajaran. | Yang dimaksud dengan kewajaran adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion yang sehat. |  |  |
|  |  |  | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit memuat: |  |  |  |
|  |  | 1. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan pemimpin satuan kerja LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; |  |  |  |
|  |  | 1. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; |  |  |  |
|  |  | 1. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; |  |  |  |
|  |  | 1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; |  |  |  |
|  |  | 1. kebijakan remunerasi; dan |  |  |  |
|  |  | 1. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan sektoral yang terkait. |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |  |
|  |  | Penerapan Manajamen Risiko |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan pemimpin satuan kerja khusus LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; |  |  |  |
|  |  | 1. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; |  |  |  |
|  |  | 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan |  |  |  |
|  |  | 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memiliki pedoman penerapan manajemen risiko. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menindaklanjuti permintaan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mencakup jenis risiko: |  |  |  |
|  |  | 1. risiko kredit; | Yang dimaksud dengan ‘risiko kredit’ adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain selaku lawan transaksi (*counterpart*) dalam memenuhi kewajiban kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  | 1. risiko pasar; | Yang dimaksud dengan ‘risiko pasar’ adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar. |  |  |
|  |  | 1. risiko likuiditas; | Yang dimaksud dengan ‘risiko likuiditas’ adalah risiko akibat ketidakmampuan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  | 1. risiko operasional; | Yang dimaksud dengan ‘risiko operasional’ adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  | 1. risiko hukum; | Yang dimaksud dengan ‘risiko hukum’ adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. |  |  |
|  |  | 1. risiko reputasi; | Yang dimaksud dengan ‘risiko reputasi’ adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  | 1. risiko strategis; dan | Yang dimaksud dengan ‘risiko strategis’ adalah risiko akibat ketidaktepatan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |  |  |
|  |  | 1. risiko kepatuhan | Yang dimaksud dengan ‘risiko kepatuhan’ adalah risiko yang timbul akibat LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan sektoral yang terkait. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Bagian Ketiga |  |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), ayat (4), Pasal 45 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. peringatan tertulis/teguran tertulis; |  |  |  |
|  |  | 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha/pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk menerbitkan produk baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan kegiatan usaha baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pemberhentian pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. denda/denda administratif. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |  |
|  |  | Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: |  |  |  |
|  |  | 1. menjaga kecukupan modal minimum dan likuiditas; |  |  |  |
|  |  | 1. menjaga kualitas aset dan kecukupan cadangan piutang pembiayaan emas; |  |  |  |
|  |  | 1. menerapkan batas maksimum pemberian pembiayaan; |  |  |  |
|  |  | 1. melakukan mitigasi risiko; dan |  |  |  |
|  |  | 1. mencantumkan rencana Kegiatan Usaha Bulion dalam rencana bisnis tahunan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |  |
|  |  | Kecukupan Modal Minimum dan Likuiditas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menjaga kecukupan modal minimum dan likuiditas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usahanya. |  |  |  |
|  |  | 1. Kecukupan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui rasio perbandingan modal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dengan aset tertimbang menurut risiko. |  |  |  |
|  |  | 1. Perhitungan likuiditas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perhitungan rasio aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar, serta perbandingan penyaluran Pembiayaan Emas dibandingkan dengan pengelolaan Simpanan Emas. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kecukupan modal minimum dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Bagian Ketiga |  |  |  |
|  |  | Kualitas Pembiayaan Emas dan Kecukupan Cadangan Piutang Pembiayaan Emas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas piutang Pembiayaan Emas senantiasa baik. | Langkah yang dapat dilakukan LJK enyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk menjaga piutang Pembiayaan Emas tetap baik antara lain penerapan standar prosedur dan operasi yang memadai dan *monitoring* berkala atas kualitas piutang Pembiayaan Emas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menetapkan kualitas piutang Pembiayaan Emas yang sama terhadap: |  |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) debitur dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama. | Yang dimaksud “debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur” antara lain untuk debitur yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sindikasi dari beberapa kreditur. |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal terdapat perbedaan kualitas piutang Pembiayaan Emas, kualitas piutang Pembiayaan Emas yang digunakan adalah yang paling rendah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat menetapkan kualitas piutang Pembiayaan Emas yang berbeda, dalam hal: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. penetapan kualitas piutang Pembiayaan menggunakan faktor risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia; |  |  |  |
|  |  | 1. penetapan kualitas piutang Pembiayaan Emas yang paling rendah telah dihapus buku; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (*cash flow*) yang tegas dari masing-masing proyek. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas piutang Pembiayaan Emas ditetapkan berdasarkan faktor penilaian: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. prospek usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. kinerja (*performance*) debitur; dan |  |  |  |
|  |  | 1. kemampuan membayar. |  |  |  |
|  |  | 1. Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. potensi pertumbuhan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; |  |  |  |
|  |  | 1. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; |  |  |  |
|  |  | 1. dukungan dari grup atau afiliasi; dan |  |  |  |
|  |  | 1. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. |  |  |  |
|  |  | 1. Penilaian terhadap kinerja (*performance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. perolehan laba; |  |  |  |
|  |  | 1. struktur permodalan; |  |  |  |
|  |  | 1. arus kas; dan |  |  |  |
|  |  | 1. sensitivitas terhadap risiko pasar. |  |  |  |
|  |  | 1. Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi komponen: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. ketepatan pembayaran pokok dan bunga atau imbal hasil; |  |  |  |
|  |  | 1. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; |  |  |  |
|  |  | 1. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Emas; |  |  |  |
|  |  | 1. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan Emas; |  |  |  |
|  |  | 1. kesesuaian penggunaan Pembiayaan Emas yang diterima; dan |  |  |  |
|  |  | 1. kewajaran sumber pembayaran kewajiban. |  |  |  |
|  |  | 1. Penilaian kualitas piutang Pembiayaan Emas ditetapkan menjadi: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. lancar; |  |  |  |
|  |  | 1. dalam perhatian khusus; |  |  |  |
|  |  | 1. kurang lancar; |  |  |  |
|  |  | 1. diragukan; atau |  |  |  |
|  |  | 1. macet. |  |  |  |
|  |  | 1. Penilaian kualitas piutang Pembiayaan Emas dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Kualitas piutang Pembiayaan Emas yang dikategorikan sebagai Pembiayaan Emas bermasalah (*non performing financing*) terdiri atas piutang Pembiayaan Emas dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilarang memiliki Piutang Pembiayaan Emas dengan kategori kualitas Pembiayaan Emas bermasalah (*nonperforming financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan Emas, lebih dari 5% (lima persen) dari total Pembiayaan Emas. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan Emas. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. 1% (satu persen) dari saldo piutang Pembiayaan Emas (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan; |  |  |  |
|  |  | 1. 5% (lima persen) dari saldo piutang Pembiayaan Emas (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan; |  |  |  |
|  |  | 1. 15% (lima belas persen) dari saldo  piutang Pembiayaan Emas (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan; |  |  |  |
|  |  | 1. 50% (lima puluh persen) dari saldo  piutang Pembiayaan Emas (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan |  |  |  |
|  |  | 1. 100% (seratus persen) dari saldo piutang Pembiayaan Emas (*Outstanding Principal*) yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang Pembiayaan Emas paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo Pembiayaan (*Outstanding Principal*) ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaannya. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan Emas sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Bagian Keempat |  |  |  |
|  |  | Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Emas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Emas kepada pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; |  |  |  |
|  |  | 1. badan usaha di mana LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion bertindak sebagai pengendali; |  |  |  |
|  |  | 1. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b; |  |  |  |
|  |  | 1. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: |  |  |  |
|  |  | 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau |  |  |  |
|  |  | 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; |  |  |  |
|  |  | 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertical: |  |  |  |
|  |  | 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam huruf e; |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; |  |  |  |
|  |  | 1. badan usaha yang Dewan Komisaris atau Direksi merupakan: |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; atau |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; |  |  |  |
|  |  | 1. badan usaha di mana: |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau |  |  |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris atau Direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan |  |  |  |
|  |  | 1. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi BMPP Emas kepada 1 (satu) debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi BMPP Emas kepada kelompok debitur yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. Debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal debitur mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi: | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. debitur merupakan pengendali debitur lain; |  |  |  |
|  |  | 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa debitur (*common ownership*); |  |  |  |
|  |  | 1. debitur memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan debitur lain; |  |  |  |
|  |  | 1. debitur menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur lain dalam hal debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. dewan komisaris dan/atau direksi debitur menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada debitur lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi BMPP Emas kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok debitur. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | 1. BMPP bagi BUMN yang berbentuk *holding* dan termasuk anak usaha BUMN tidak diperlakukan sebagai kelompok debitur. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian bagi penyelenggaran Kegiatan Usaha Bulion ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Bagian Kelima |  |  |  |
|  |  | Penegakan Kepatuhan |  |  |  |
|  |  | Paragraf 1 |  |  |  |
|  |  | Rencana Pemenuhan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, dan/atau Pasal 60 ayat (1), diberikan surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  | 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  | 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana pada ayat (2). |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion tetapi rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu tertentu. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dapat melaksanakan rencana pemenuhan. |  |  |  |
|  |  | 1. Jangka waktu rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rencana pemenuhan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | Paragraf 2 |  |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang: |  |  |  |
|  |  | 1. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ayat (7), dan/atau ayat (13): |  |  |  |
|  |  | 1. ditolak rencana pemenuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9); dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 57 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. peringatan tertulis/teguran tertulis; |  |  |  |
|  |  | 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha/pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk menerbitkan produk baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan kegiatan usaha baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pemberhentian pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. denda/denda administratif. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | PELAPORAN |  |  |  |
|  |  | Bagian Kesatu |  |  |  |
|  |  | Laporan Berkala |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyusun: |  |  |  |
|  |  | 1. laporan bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion; dan |  |  |  |
|  |  | 1. laporan tahunan yang terdiri atas: |  |  |  |
|  |  | 1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; |  |  |  |
|  |  | 1. laporan manajemen; dan |  |  |  |
|  |  | 1. laporan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 wajib disusun:. |  |  |  |
|  |  | 1. berdasarkan tahun takwim; |  |  |  |
|  |  | 1. standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan |  |  |  |
|  |  | 1. dalam mata uang rupiah. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai: |  |  |  |
|  |  | 1. bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan aktivitas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan |  |  |  |
|  |  | 1. bentuk dan susunan laporan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, |  |  |  |
|  |  | ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan: |  |  |  |
|  |  | 1. laporan bulanan aktivitas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan |  |  |  |
|  |  | 1. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, |  |  |  |
|  |  | secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain disampaikan secara daring, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara luring. |  |  |  |
|  |  | 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud. |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu. | Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain keadaan kahar. |  |  |
|  |  | Bagian Kedua |  |  |  |
|  |  | Laporan Lainnya |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk menyampaikan laporan selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), informasi, dan/atau dokumen tertentu dalam rangka pengawasan. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  | Bagian Ketiga |  |  |  |
|  |  | Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 66 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa: |  |  |  |
|  |  | 1. peringatan tertulis/teguran tertulis; |  |  |  |
|  |  | 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha/pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  |
|  |  | 1. penurunan tingkat kesehatan; |  |  |  |
|  |  | 1. pembatalan persetujuan; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan untuk menerbitkan produk baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan melakukan kegiatan usaha baru; |  |  |  |
|  |  | 1. larangan menjadi pemegang saham pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pemberhentian pengurus; |  |  |  |
|  |  | 1. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
|  |  | 1. denda/denda administratif. |  |  |  |
|  |  | 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |  |
|  |  | 1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya. |  |  |  |
|  |  | 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain berdasarkan pertimbangan tertentu, dalam rangka pengaturan dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Bulion. | Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu:  Kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan telah melaksanakan kegiatan: |  |  |  |
|  |  | 1. Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, dan/atau Perdagangan Emas, harus: |  |  |  |
|  |  | 1. melakukan pengajuan pendaftaran produk atau aktivitas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan |  |  |  |
|  |  | 1. menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  | 1. Penitipan Emas, harus melakukan pengajuan pendaftaran produk atau aktivitas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ketentuan di bidang sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan terkait emas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan terkait emas dapat berupa kegiatan cicilan pembelian emas maupun pembiayaan tunai dengan agunan berupa emas, dinyatakan tetap dapat dijalankan sebagai kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan, lembaga pembiayaan, maupun lembaga jasa keuangan lainnya, tanpa perlu mengajukan persetujuan sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengaturan Kegiatan Usaha Bulion tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN,        MAHENDRA SIREGAR  Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,        YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR |  |  |